

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
(STUDI KASUS DESA SIMANDOLAK)**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh:

JELLY ANGGIA PUTRI

220411005

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SEKRETARIS


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. RISVANDI, S.Pd.I., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN HEWAN
TERNAK (STUDI KASUS DESA SIMANDOLAK)
NAMA : JELLY ANGGIA PUTRI
NPM : 220411005
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

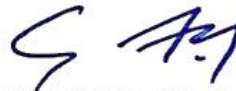
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : JELLY ANGGIA PUTRI

NPM : 220411005

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 12 Mei 2026



JELLY ANGGIA PUTRI
NPM. 220411005

MOTTO

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milik mu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini”.

(Baskara Putra-Hindia)

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, kesehatan, serta kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tiada daya dan upaya tanpa izin-Nya, sehingga setiap proses yang penuh perjuangan, lelah, dan air mata dapat dilalui hingga sampai pada titik ini. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Pino Saputra dan Ibunda Desmarianti**, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih dan cinta penulis atas segala pengorbanan, doa, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Terima kasih ayah dan ibu yang selalu menjadi tempat penulis bersandar dalam setiap keadaan, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat dan doa di setiap langkah perjalanan penulis. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu kebahagiaan kecil yang penulis persembahkan untuk ayah dan ibu, sebagai bukti bahwa setia doa dan pengorbanan kalian tidak sia-sia.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



JELLY ANGGIA PUTRI
NPM. 220411005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Di Desa Simandolak)" dengan baik dan tepat waktu.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan yang jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1
5. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing 2.
6. Orang Tua penulis yang Terkasih dan Tersayang terimakasih atas Do'a, kasih sayang, dukungan, dan kesabaran terhadap penulis

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada

menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam penguatan kelembagaan desa di Indonesia.

Teluk Kuantan, 12 Mei 2026



Jelly Anggia Putri

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara.....	9
2.1.2 Teori Kebijakan Publik.....	11
2.1.3 Teori Implementasi.....	13
2.1.4 Peraturan Bupati Penertiban Hewan Ternak.....	17
2.1.5 Teori Perilaku Sosial Masyarakat Desa.....	18
2.2 Kerangka Pemikiran	19
2.3 Definisi Operasional	20
2.4 Operasional Variabel.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Informan.....	23

3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Fokus Penelitian	25
3.5 Lokasi Penelitian	25
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	29
4.1 Sejarah Desa.....	29
4.2 Demografi	30
4.2.1 Batas Wilayah Desa.....	30
4.2.2 Luas Wilayah Desa.....	31
4.2.3 Penduduk	31
4.3 Keadaan Sosial	31
4.3.1 Pendidikan	31
4.3.2 Lembaga Pendidikan.....	32
4.3.3 Keagamaan	32
4.4 Keadaan Ekonomi	33
4.5 Kondisi Pemerintahan Desa	34
4.6 Satgas penertiban hewan ternak Desa Simandolak	34
4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	35
BAB VI PENUTUP	38
6.1 Kesimpulan	38
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Masyarakat Pemilik Ternak di Desa Simandolak.....	6
Tabel 2.1 : Operasional Variabel.....	21
Tabel 3.1 : Informan Penelitian	24
Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian	30
Tabel 4.1 : Nama-nama yang Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Simandolak	30
Tabel 4.2 : Batas Wilayah Desa	30
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Tabel 4.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simandolak	32
Tabel 4.5 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Simandolak	32
Tabel 4.6 : Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Simandolak..	32
Tabel 4.7 : Jumlah Rumah Ibadah di Desa Simandolak	33
Tabel 4.8 : Mata Pencaharian Pokok Desa Simandolak.....	33
Tabel 4.9 : Jumlah Perangkat Pemerintah Desa Simandolak	34
Tabel 4.10 : Nama-nama Satgas Desa Simandolak	34
Tabel 5.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usia.....	39
Tabel 5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan...	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir	19
Gambar 4.1 : Skema Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	37
Gambar 5.1 : Surat Sosialisasi Penertiban Hewan Ternak	42
Gambar 5.2 : Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak oleh Satgas Desa Simandolak	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran I : Daftar Kuisioner Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus Desa Simandolak)...	
Lampiran II : Dokumentasi Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Simandolak)	
Lampiran III : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 052/Kpts/FIS/UNIKS/X/2025 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara	
Lampiran IV : Surat Balasan Riset Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Simandolak)	
Lampiran V : Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Simandolak)	
Lampiran VI : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian tentang Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Simandolak).....	
Lampiran VII : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian tentang Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Simandolak).....	
Lampiran VIII : Daftar Riwayat Hidup Penulis	

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Desa
Simandolak)**

ABSTRAK

**Oleh :
Jelly Anggia Putri**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Studi Kasus Desa Simandolak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya hewan ternak seperti sapi dan kambing yang berkeliaran di jalan raya, fasilitas umum, serta lahan milik masyarakat, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kebersihan, dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Satgas, Anggota Satgas, Peternak, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Studi Kasus Desa Simandolak sudah terimplementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Penertiban Ternak

***IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 12 OF 2012
ON LIVESTOCK CONTROL (A CASE STUDY IN SIMANDOLAK VILLAGE)***

ABSTRACT

***By :
JELLY ANGGIA PUTRI***

This study aims to determine the implementation of the Regent Regulation of Kuantan Singingi Number 12 of 2012 concerning livestock control in Simandolak Village. The background of this study is based on the fact that livestock such as cows and goats are still found roaming on public roads, public facilities, and community-owned land, causing disturbances to public order, cleanliness, and safety. This study uses the policy implementation theory proposed by George C. Edward III with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The informants in this study consisted of 15 people, including the village head, task force leader, task force members, livestock owners, and local community members. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results show that the implementation of Regent Regulation Number 12 of 2012 concerning livestock control in Simandolak Village has been running fairly well.

Keywords : Implementation, Livestock Control

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara Agraris Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perdesaan yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Selain sebagai petani Sebagian besar masyarakat di daerah perdesaan juga berprofesi sebagai peternak. Hewan ternak yang disebut hewan ternak pemeliharaan seperti kerbau, sapi, kambing, domba, anjing, babi, dan sejenisnya.

Hewan ternak yang disebut sebagai hewan ternak adalah hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti di jalan raya, dan lapangan sepak bola karena tidak diikat atau di kandangkan oleh pemiliknya. Hal ini sering terjadi di beberapa daerah terutama Desa Simandolak. Hewan ternak ini juga sering ditemukan berkeliaran di sekitar pekarangan warga, lahan pertanian, dan Perkebunan warga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi Masyarakat. Hewan ternak juga kerap berkeliaran di jalan raya terutama ternak sapi, kambing, dan anjing, sehingga mengganggu keamanan pengguna jalan.

Jumlah penduduk Indonesia yang padat maka permintaan konsumsi pangan hewani yang berasal dari peternakan sangat tinggi. Berdasarkan konteks ini peluang agribisnis peternakan terbuka luas dalam penyediaan kebutuhan konsumsi pangan dan ini merupakan salah satu tantangan nyata yang sekaligus peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor peternakan, karena banyaknya Masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang peternakan. Maka pemerintah harus campur tangan dalam pengembangan peternakan tersebut

dengan cara mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa dikelola dengan baik dan kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan Bersama.

Sadar bahwa peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang vital, sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil ekspor maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peternakan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan hewan, dan di pertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Berdasarkan Undang-Undang ini diatur beberapa aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan peternakan yang tertuang dalam pasal 3 sebagai berikut :

1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan Masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.
3. Melindungi, mengamankan, atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu Kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
4. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan Masyarakat

5. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan Kesehatan hewan.

Melihat dari tujuan penyelenggaraan dari peternakan dan Kesehatan peternakan, maka perlu adanya kebijakan yang mengawasi penyediaan hewan ternak dan terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyedia pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Dengan adanya kebijakan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing termasuk untuk mengelolah kekayaan daerah. Dimana keberadaan hewan ternak merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dikelola dengan baik oleh daerah tersebut. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan tentang keberadaan hewan ternak tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah di Kabupaten menjadi titik berat otonomi daerah, tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi ditingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Pemerintah daerah akan terselenggara dengan baik apabila masyarakatnya yakin bahwa mereka bagian dari pemerintahan itu, dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan Masyarakat tersebut.

Seiring dengan terus bertumbuh dan berkembangnya hewan ternak di Kabupaten Kuantan Singingi maka ketertiban hewan ternak menjadi salah satu tugas yang sangat penting yang harus dijaga dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan yang mana dalam pasal 6 menjelaskan setiap orang atau badan yang memelihara hewan wajib mengandangkan hewannya untuk kepentingan Kesehatan dan ketertiban umum dan dilarang hewan ternaknya berkeliaran difasilitas umum. Untuk lebih spesifik Pemerintah Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. Dimana pada peraturan ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : “setiap ternak wajib memiliki kandang tempat pemeliharaannya” kemudian terdapat juga larangan bagi pemilik ternak dan hewan penular rabies yang terdapat pada pasal 10 yang menegaskan bahwa :

1. Dilarang melepas ternak pada kawasan pemukiman, fasilitas umum seperti: perikanan, penghijauan, reboisasi, dan pembibitan.
2. Dilarang melepas ternak pada kawasan pemukiman, fasilitas umum seperti:

Perkantoran, sekolah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, didalam kota, pasar kecamatan, dan pasar desa, jalan-jalan dan tempat-tempat lain yang diperlukan untuk kepentingan umum.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies bertujuan agar salah satu aset daerah ini dapat terpelihara dengan baik sehingga perkembangan hewan tersebut akan lebih baik dan dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian juga dijelaskan pada Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 Pasal 9 yang berbunyi “Apabila terjadi kecelakaan kerusakan dan kerugian terhadap

orang lain akibat adanya ternak yang berkeliaran , maka pemilik ternak wajib mengganti kerugian kepada orang yang bersangkutan”. Pada pasal 17 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaian melanggar peraturan bupati ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selama beberapa tahun terakhir, Desa Simandolak menghadapi persoalan yang semakin memuncak, hewan ternak seperti sapi dan kambing milik warga sering dibiarkan lepas berkeliaran. Jika pagi hari, kawanan sapi sering terlihat berjalan pelan di jalan utama, kadang berhenti di persimpangan seolah menjadikan jalan desa sebagai tempat bermain. Kambing-kambing kecil berkeliaran di pinggir jalan, memakan dedaunan apa saja yang mereka temui. Maka di malam hari kondisinya jauh lebih parah.

Ketika matahari terbenam dan kegiatan warga mulai mereda kawanan sapi justru semakin aktif berkeliaran. Mereka jarang pulang ke kandang pemiliknya, banyak sapi terlihat tidur di tengah jalan utama desa, menjadikan badan jalan sebagai tempat berbaring. Pengendara motor yang pulang malam sering terkejut mendapati tubuh besar sapi yang tergeletak di tengah jalur, hanya terlihat oleh cahaya lampu motor ataupun mobil yang menyorot.

Tidak hanya itu, beberapa sapi maupun kambing kerap beristirahat di teras rumah yang kosong. Kotoran sapi tersebar dimana-mana, di jalan utama, di teras rumah, di depan warung, bahkan di area publik seperti lapangan dan halaman fasilitas desa.

Bagi pejalan kaki, bau menyengat dan kondisi jalan yang kotor membuat aktivitas pagi menjadi tidak nyaman. Bagi pengendara motor kondisi ini menjadi sumber bahaya yang nyata.

Tabel 1.1 : Data masyarakat pemilik ternak di Desa Simandolak

No	Nama Dusun	Jumlah Peternak
1.	Dusun Kubu	15 Orang
2.	Kampung Baru	13 Orang
3.	Koto Simandolak	22 Orang
4.	Kampung Durian	35 Orang
5.	Simarondan	28 Orang
6.	Banjar Baruh	19 Orang
Jumlah		132 Orang

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

Dari tabel diatas, melihat jumlah masyarakat yang memiliki hewan ternak tersebut, diperlukan adanya penertiban dan pengelolaan hewan ternak yang lebih terarah agar menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta kenyamanan masyarakat. Penertiban hewan ternak ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan Desa Simandolak yang tertib, sehat, dan aman.

Warga sering mengeluh karena tanaman rusak, jalan kotor, dan resiko kecelakaan meningkat. Pemerintah desa bersama BPD menggelar musyawarah dan menyepakati perlunya aturan resmi. Hasilnya adalah Peraturan Desa Simandolak Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penertiban Hewan Ternak yang menegaskan :

1. Ternak wajib dikandangkan, diikat, atau dijaga
2. Ternak dilarang berkeliaran di lahan orang lain, fasilitas umum, dan jalan raya

3. Pemilik yang lalai akan dikenai denda jika hewannya dibiarkan berkeliaran sampai Satgas menertibkan.

Untuk mengakkan aturan, dibentuklah Satgas Penertiban Hewan Ternak, yang bertugas menangkap ternak liar, menempatkan ternak di kandang sementara, memberi makan ternak yang belum dijemput, menegakkan denda bagi pemilik yang tidak patuh.

Sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 pasal 6 yang berbunyi “Terhadap pemilik atau peternak yang hewan ternaknya masih lepas berkeliaran jika diamankan atau dikarantina oleh Satuan Tugas (Satgas) dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk biaya makan ternak selama dikarantina. Biaya denda yang ditetapkan yaitu untuk sapi dan kerbau sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor/perhari sejak berada dalam kandang karantina dan biaya denda untuk kambing sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) perekor/perhari sejak berada dalam kandang karantina.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak? (Studi Kasus Di Desa Simandolak)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Di Desa Simandolak)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Memberikan wawasan tentang efektivitas dan tantangan dalam implementasi kebijakan publik di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan hewan ternak.

2. Praktis

Penertiban hewan ternak yang lebih teratur dapat mengurangi kerugian akibat kerusakan tanaman pertanian, meningkatkan hasil pertanian, dan membantu menjaga kestabilan ekonomi Masyarakat serta meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya peraturan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian, (dalam Daryanto, 2006 : 7) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Max Weber, (dalam Kumorotomo), 2005 : 82) Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara.

(dalam Syafie, 2010 : 14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan sebelumnya.

Siagian, (2001 : 38) Pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih

tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

Menurut Soetarto dan R.P Soewarno (dalam Akadun, 2009:36) menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, (dalam Syafie, 2010 : 25) administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Selanjutnya George J. Gordon, administrasi publik dapat dirumuskan sebagai sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan.

Administrasi negara juga terkadang disebut juga sebagai administrasi publik, karena terjemahan dari kata *public administration*. Karena kata *publik* diterjemahkan menjadi negara maka akan terasa serba kekuasaan yang menzalimi Masyarakat. Tetapi bila diterjemahkan sebagai Masyarakat, ataua

berkonotasi pelayanan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Untuk itu perlu keseimbangan dalam sistem administrasi negara.

Menurut Chander dan Plano, (dalam pasolong, 2010 : 7) administrasi negara adalah proses Dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, mengelola (manage) Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam definisi ini lebih menekankan aspek keterlibatan personel dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Syafiie, (2010 : 34) Ilmu administrasi publik memiliki objek material yaitu negara dan objek formanya, pelayanan publik, organisasi publik, manajemen publik dan kebijaksanaan publik. Ilmu administrasi publik memusatkan perhatiannya pada pelayanan aparat negara, penyelenggaraan departemental dan pengadministrasian tata usaha negara.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Pasolong (2014 : 39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua Tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pengertian kebijakan menurut pendapat Said Zainal Abidin, (dalam Mulyadi, 2015 : 38) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang

bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut N. Dunn (N. Dunn, 2003:22) kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling berantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Budiarjo (2008:20). Kebijakan adalah suatu Kumpulan Keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah suatu rangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan, nilai;nilai, dan praktek-praktek yang terarah Dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Proses suatu kebijakan salah satunya adalah formulasi kebijakan yaitu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah berupa suatu program kinerja yang akan dilaksanakan. Adapun bahasan terhadap program kinerja tersebut lebih

dijelaskan pada kajian “Manajemen Pemerintahan Daerah” Dimana pada dasarnya manajemen memiliki 5 fungsi yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengumpulan sumberdaya, Pengendalian kerja dan pengawasan. Namun untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu program kinerja berupa pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan dilapangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi produktivitas yaitu mengarah pada pencapaian suatu tujuan yang maksimal, yaitu pencapaian suatu tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Selanjutnya efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam suatu proses implementasi kebijakan.

2.1.3 Teori Implementasi

Gaffer, (1999 : 295) Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada Masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah praturan pemerintah , Keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana,

sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke Masyarakat.

Menurut Abdul Wahab dalam Tahir (2005 : 55), Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau Keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau Keputusan badan peradilan lazimnya, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingi dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn 9dalam Winarno, 2008 : 146) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai Tindakan-tindakan dalam Keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah Keputusan-keputusan menjadi Tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh Keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Grindle dalam Sujianto (2008 : 31), Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme panjabaran dan operasional dari Keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, Keputusan, dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Syukani, (2004 : 295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada Masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke Masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan.

Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan memfokuskan kepada dua aspek, yaitu siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan pengaruhnya terhadap isi kebijakan serta dampak dari kebijakan tersebut. Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dilakukan oleh Edward III dalam Agustino (2014:149) mengenai beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu meliputi :

- a. Komunikasi, merupakan salah satu faktor yang penting yang menentukan keberhasilan penapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten.

- b. Sumberdaya, merupakan salah satu faktor penting menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya kewenangan.
- c. Disposisi, yaitu sikap para pelaksana yang merupakan faktor ketiga yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang mereka harus lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan faktor terakhir yang penting yakni merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka ini menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan.

2.1.4 Peraturan Bupati Penertiban Hewan Ternak

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus adanya usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan stake holder yakni pihak swasta yang ada di daerah. Banyak hal yang menjadi penghambat dalam mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah karena masyarakat indonesia yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata penaharian pertanian dan peternakan. Dapat dicontohkan bahwa pada saat sekarang ini bangsa indonesia menjadi negara yang terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu didunia. Selain itu juga dari segi peternakan bangsa indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada didunia.

Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Satpol PP, dimana Satpol PP juga berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu kepala desa juga diberi kewenangan untuk melakukan penertiban dengan membentuk satuan tugas penertiban ternak. Hewan ternak yang berkeliaran dapat dilakukan penyitaan oleh pelaksana penertiban ternak, yang disita ditangani dengan baik oleh pelaksana penertiban hewan ternak.

2.1.5 Teori Perilaku Sosial Masyarakat Desa

Soekanto, (2017 : 174) menyatakan bahwa perilaku sosial merupakan perilaku individu yang timbul sebagai akibat adanya hubungan atau interaksi dengan individu lain maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku sosial dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, adat-istiadat, kebudayaan, dan lingkungan sosial tempat seseorang hidup. Melalui interaksi tersebut, seseorang akan menunjukkan sikap dan tindakan tertentu yang mencerminkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat.

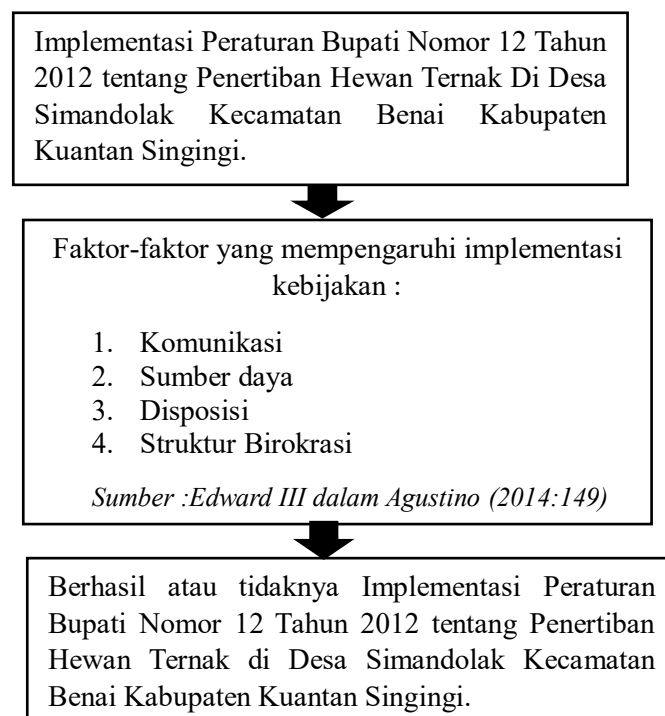
Perilaku sosial masyarakat desa pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan kekeluargaan yang erat, semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, serta kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Namun demikian, perilaku masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran hukum, kebiasaan, dan lingkungan sosial sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini, teori perilaku masyarakat digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat Desa Simandolak dalam menyikapi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak. Perilaku masyarakat, khususnya pemilik ternak, dapat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan, kesadaran dalam mengandangkan ternak, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penertiban hewan ternak di Desa Simandolak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam meningkatkan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies. Agar terjaminnya kehidupan Masyarakat yang lebih baik dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak tersebut, sesuai dengan apa yang diinginkan demi ketertiban umum. Dan untuk mendorong semua itu, maka perlulah campur tangan pemerintah dan Masyarakat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan legalitas daerah.

Gambar 2. 1 : Kerangka Berpikir Tentang Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : modifikasi penelitian terdahulu 2026

2.3 Definisi Operasional

Untuk memudahkan Analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Komunikasi, yaitu implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten.
2. Sumber daya, merupakan salah satu faktor penting menentukan kepentingan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, dan sumber daya kewenangan.
3. Disposisi, yaitu sikap pelaksana dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakannya tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur Birokrasi, yaitu dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif kalannya implementasi kebijakan.

2.4 Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjabaran dari konsep-konsep penelitian menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur, sehingga peneliti dapat menentukan indikator yang sesuai untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, definisi operasional digunakan untuk memperjelas makna variabel agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. (Sugiyono 2009 : 39).

Tabel 2. 1 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Implementasi	Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kuantan Singingi	1. Komunikasi	a. Bagaimana sosialisasi mengenai kebijakan b. Intensitas komunikasi aparatur birokrasi dengan Masyarakat (peternak hewan)	Baik, Kurang baik, Tidak baik
		2. Sumber Daya	a. Kemampuan birokrat dalam sosialisasi kebijakan b. Ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan	Baik, Kurang baik, Tidak baik

		3. Disposisi	a. Karakter pelaksana kebijakan b. Tingkat demokratis pelaksana ketersediaan SOP	Baik, Kurang baik, Tidak baik
		4. Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan SOP b. Tingkat kepedulian atasan terhadap kinerja karyawan	Baik, Kurang baik, Tidak baik

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

H.B Sutopo (2002 : 39) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Dengan kata lain penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, tidak ditentukan oleh kuantitasnya tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya dan cara memandang atau perspektifnya.

3.2 Informan

Bungin, (2007 : 76) Informan penelitian merupakan subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang di dasarkan pada tujuan tertentu.

Alasan penulis menggunakan Teknik purposive sampling untuk pengambilan data pada informan Masyarakat adalah penulis hanya mengambil Sebagian Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar rumah peternak, dan Sebagian lagi adalah Masyarakat pemilik lahan atau pekarangan yang tanamannya di rusak oleh hewan ternak sapi. Hal ini dilakukan karena subjek dianggap

memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Dikarenakan ini merupakan penelitian kualitatif, maka sample di ambil tidak berdasarkan keterwakilan.

Adapun informan yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah antara lain :

Tabel 3. 1 : Informan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Informan	Jumlah	Presentase
1.	Kepala Desa	1 orang	6,7%
2.	Ketua Satgas	1 orang	6,7%
3.	Anggota Satgas	3 orang	20%
4.	Peternak	5 orang	33,3%
5.	Masyarakat	5 orang	33,3%
	Jumlah	15 orang	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

3.3 Sumber Data

Arikunto, (2002 : 107) Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator untuk memperoleh hasil analisis yang jelas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabuapten Kuantan Singingi Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Simandolak dan selain itu juga terdiri dari hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu bersumber dari hasil bacaan atau literatur atau buku buku atau data terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sebagai berikut :

- 3.4.1 Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Simandolak
- 3.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Simandolak

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini di dasarkan karena Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pnertiban Hewan Ternak ini mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singngi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Menurut Arikunto, (dalam Gunawan, 2015 : 143) observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Moleong, (2002 : 133) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada aparatur Desa Simandolak, para peternak dan masyarakat setempat. Penulis secara langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk daftar pertanyaan, kemudian langsung ditanyakan kepada para informan seperti yang telah disebutkan diatas.

Selanjutnya jawaban dari informan ditulis dan direkam kemudian dikumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data.

3. Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, berarti mengejar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk, (dalam Gunawan, 2015 : 175) seribgkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi Sejarah sebagai kebalikan dari para kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan diabulasikan dalam bentuk tabel, barulah kemudian membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil Kesimpulan dengan induktif.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3. 2 : Jadwal Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Simandolak.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal		X																		
2	Pembuatan Proposal									X	X	X	X								
3	Bimbingan Proposal														X						
4	Seminar Proposal																				
5	Revisi Proposal																				
6	Pembuatan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Skripsi																				
9	Revisi Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa

Perjuangan heroik rakyat Indonesia tercermin dalam perlawanan rakyatnya menentang dan mengandang serbuan bala tentara belanda untuk menjajah negeri nusantara, di perbagi daerah terjadi perlawanan rakyat menentang penjajah Belanda. Tidak terkecuali rakyat Rantau di Rantau Kuantan. Berkat perjuangan gigi rakyatnya maka pada tahun 1905 M barulah Kuantan Singingi yang di kenal dengan sebutan rantau nan kurang aso duo pulua jatuh ke dalam kekuasaan penjajah Belanda. Dengan kata lain Kabupaten Kuantan Singingi sekarang ini hanya dijajah Belanda selama ± 40 tahun. Padahal Nusantara Indonesia secara resmi di jajah Belanda selama ± 350 tahun. Demikian itulah satu kenyataan yang perlu di herankan, karena ternyata daerah lain dinusantara Indonesia ada diantaranya yang tidak pernah tahluk dibawa penjajahan Belanda. Daerah yang dimaksud adalah kawasan provinsi Aceh sekarang ini, berkat perjuangan yang gigih rakyatnya yang dipimpin oleh pemimpinnya antara lain Teuku Umar, Sri Kandi, Cut Nyak Dien dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu guna mengenang dan menghargai jasa perjuangan rakyat kuantan sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi penerus perjuangan pembangunan negeri minimal dibangun sebuah tugu peringatan dengan mencantumkan nama-nama para pemimpin perjuangannya.

Dari sekian banyak benteng pertahanan rakyat kuantan maka diantaranya adalah yang sudah terkenal dengan nama benteng Gajah Putih. Sehingga perlawanan rakyat kuantan menentang penjajah belanda itu lebih dikenal dengan nama perang Gajah Putih. Benteng Gajah Putih diletak di bagian selatan sungai kuantan tepatnya dalam kawasan Sungai Guntung, Mengenai pembangunan tugu tersebut telah didirikan di simpang Lapau Gading Desa Tebing Tinggi.

Adapun nama-nama yang menjabat sebagai kepala Desa Simandolak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Simandolak

No	Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa	Periode/Tahun
1.	Syarif	1983 s/d Tahun 1989
2.	Buyung	1989 s/d Tahun 1195
3.	M.Isya Usman	1995 s/d Tahun 2001
4.	Syamsir M.Nur dan Akmal Hidayah	2001s/d Tahun 2007
5.	Ajasmi dan Akmal Hidayah	2007 s/d Tahun 2013
6.	Deswanriadi dan Akmal Hidayah	2013 s/d Tahun 2018
7.	(PLT) Asrul dan Herlisman	2019
8.	Pikri dan Febrian Ramadhan	2020 s/d Sekarang

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Simandolak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa

1.	Sebelah Utara	Desa Beringin Jaya
2.	Sebelah Selatan	Desa Tanjung dan Sungai Kuantan
3.	Sebelah Barat	Desa Tebing Tinggi
4.	Sebelah Timur	Desa Pulau Ingu

Sumber : Kantor Desa Simandolak

4.2.2 Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa Simandolak yaitu 1.610 Ha, yang terdiri dari 105 Ha Pemukiman, 795 Ha Pertanian Sawah, 20 Ha Ladang/Tegalan, 15 Ha Perkebunan, 300 Ha Rawa-rawa, 0,5 Ha Perkantoran, 5 Ha Sekolah, 3 Ha Jalan, 1 Ha Lapangan Sepak Bola.

4.2.3 Penduduk

Kondisi penduduk di Desa Simandolak menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	793
2.	Perempuan	842
Jumlah Total		1.635 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Simandolak 2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Simandolak Tahun 2026 lebih di dominasi oleh Perempuan dengan 842 jiwa sedangkan Laki-laki berjumlah 793 jiwa dengan jumlah total 1.635 jiwa.

4.3 Keadaan Sosial

4.3.1 Pendidikan

Untuk melihat gambaran pendidikan Masyarakat Desa Simandolak dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simandolak

Tingkat Pendidikan	Jumlah
TK/PAUD	24 Orang
Tamat SD	268 Orang
Tamat SMP	250 Orang
Tamat SMA	100 Orang
Tamat SL/Diploma	81 Orang
Buta huruf	5 Orang
Putus sekolah	-

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas jumlah pendidikan masyarakat Desa Simandolak yang terbanyak adalah Tamat SD.

4.3.2 Lembaga Pendidikan

Untuk melihat gambaran lembaga pendidikan masyarakat Desa Simandolak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Simandolak

Sarana pendidikan	Jumlah
Gedung TK	1
Gedung PAUD	1
Gedung SD	2
SLTP	1
SLTA/MA	1

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan masyarakat Desa Simandolak cukup memadai.

4.3.3 Keagamaan

Berikut ini adalah agama yang di anut oleh masyarakat Desa Simandolak :

Tabel 4.6 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Simandolak

Agama	Jumlah
Islam	1579
Kristen	-

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Simandolak beragama islam.

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam ibadah, sarana rumah ibadah didesa Simandolak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah Rumah Ibadah di Desa Simandolak

Jenis Agama	Jumlah
Masjid	1
Mushalla/Surau	10

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

4.4 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Simandolak secara kasat mata tidak terlalu jelas terlihat perbedaannya. Hal ini, disebabkan karena rata-rata masyarakat Desa Simandolak bermata pencaharian sebagai petani seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Mata Pencaharian Pokok Desa Simandolak

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	753 Orang
Pedagang	12 Orang
PNS	70 Orang
Tukang	10 Orang
Guru	30 Orang
Bidan/perawat	5 Orang
Pensiunan	15 Orang
Sopir/angkutan	4 Orang
Peternak	132 Orang
TNI/Polri	-
Jumlah Total	1.031

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

4.5 Kondisi Pemerintahan Desa

Luas wilayah Desa Simandolak dengan luas wilayah 1.200 ha. Desa Simandolak terdiri dari enam dusun yaitu : Dusun Kubu, Dusun Kampung Baru, Dusun Koto, Dusun Kampung Durian, Dusun Simarondan, dan Dusun Banjar Baruah. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Simandolak terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Tata Usaha, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 6 Kepala Dusun. Desa Simandolak terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tangga (RT). Adapun jumlah Aparat Pemerintah Desa Jalur Patah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 : Jumlah Perangkat Pemerintah Desa Simandolak

No	Usia	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Perangkat Desa	10
4.	Kepala Dusun	6
5.	BPD	7
Jumlah Total		25

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

4.6 Satgas penertiban hewan ternak Desa Simandolak

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak, Pemerintah desa simandolak membentuk satgas penertiban hewan ternak yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10 : Nama-nama Satgas Desa Simandolak

No	Nama	Jabatan
1.	Ajasmi	Ketua Satgas
2.	Pikri	Kepala Desa
3.	Febian Ramadan	Sekretaris Desa
4.	Meki Saputra	Anggota satgas
5.	Wahyu	Anggota satgas
6.	Agusrianto	Anggota satgas
7.	Apri	Anggota satgas
8.	Rafles	Anggota satgas

9.	Iki aron	Anggota satgas
10.	Mulyadi	Anggota satgas
11.	Saparudin	Anggota satgas
12.	Zulpahmi	Anggota satgas
13.	Abdul Hakri	Anggota satgas
14.	Hasbi	Anggota satgas
15.	Iput A.	Anggota satgas
16.	Iput B.	Anggota satgas
17.	Kelpin Samudra	Anggota satgas
18.	Listianingsih	Anggota satgas
19.	Mawardi	Anggota satgas
20.	Muklis Sandi	Anggota satgas
21.	Nopri	Anggota satgas
22.	Nopriandi	Anggota satgas
23.	Dede	Anggota satgas
24.	Teguh M. Yamin	Anggota satgas
25.	Kamarudin	Anggota satgas
26.	Yusransah	Anggota satgas
27.	Halidumi	Anggota satgas
28.	Ramli	Anggota satgas
29.	Samsuri	Anggota satgas
30.	Junaidi	Anggota satgas
31.	Gunarjo	Anggota satgas
32.	Musdiah	Anggota satgas
33.	Ihat	Anggota satgas
34.	Paldi	Anggota satgas
35.	Wandi	Anggota satgas
36.	Lusi	Anggota satgas
37.	Sarlis	Anggota satgas
38.	Ijon lege	Anggota satgas
39.	Piri	Anggota satgas
40.	Sial	Anggota satgas

Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

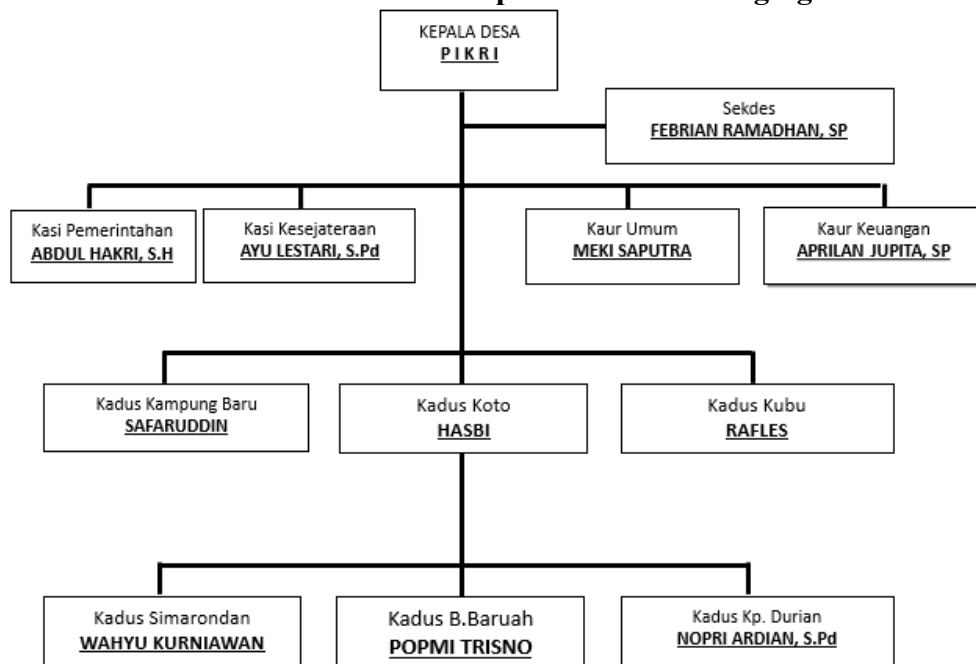
Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Adapun Struktur Organisasi Desa Simandolak pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1 Skema Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simandolak
Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber : Kantor Desa Simandolak Tahun 2026

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Studi Kasus Desa Simandolak, sudah terimplementasi, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat, peternak, anggota satgas, ketua satgas, dan kepala desa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lingkungan masyarakat Desa Simandolak.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disini peneliti akan memberikan saran agar kedepannya pelaksanaan kebijakan di Desa Simandolak ini akan berjalan lebih baik. Adapun sarannya sebagai berikut :

6.2.1 Pemerintah Desa Simandolak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan peternak mengenai aturan penertiban hewan ternak agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi peraturan tersebut.

6.2.2 Kepala Desa dan Satgas diharpkan terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak supaya kebijakan berjalan lebih efektif

- 6.2.3 Masyarakat dan peternak diharapkan lebih sadar dan bertanggung jawab untuk tidak melepas hewan ternak secara bebas agar tidak mengganggu lingkungan dan ketertiban desa.
- 6.2.4 pemerintah desa simandolak disarankan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik. Kotoran ternak yang dikumpulkan oleh masyarakat dapat dibeli oleh pemerintah desa atau melalui badan usaha milik desa (BUMDes), kemudian diolah menjadi pupuk organik yang memiliki nilai ekonomi. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pencemaran lingkungan, serta mendorong pemilik ternak agar lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya dan tidak lagi melepas ternak secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akadun, 200. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Drenama Group.
- Daryanto, H.M. 2006. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gaffer. 1999. Politik Indonesia. *Transmisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Askara.
- H.B. Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Surakarta:UNS Press.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Dedi, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moelong, Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitattif*. Bandung: PT Remaja.
- N. Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakn Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Admnistrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 2001. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: AlfaRiau.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaukani, 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta: Media Presindo.

B. Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Hewan Penular Rabies

Peraturan Desa Simandolak Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

C. Jurnal

Indriani, Nella. (2018). “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015:2016”. *Jurnal Administrasi Negara*

- Pinky, (2023). “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una”. Jurnal Administrasi Publik
- Suhendra, (2019). “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur”. Jurnal Administrasi Publik

11/3 - 2026
Sec Paper menya.
P II A a

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa
Simandolak)

A. Identitas Peneliti

Nama : Jelly Anggia Putri
NPM : 220411005
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :
Usia :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiaannya.
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

I. Komunikasi

1. Bagaimana proses penyampaian informasi atau sosialisasi Perauran Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak kepada masyarakat Desa Simandolak ?

Jawaban :

2. Apakah komunikasi antara aparat desa dan masyarakat terkait pelaksanaan aturan ini sudah berjalan secara jelas dan konsisten?

Jawaban :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiaannya.
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

I. Komunikasi

1. Bagaimana proses penyampaian informasi atau sosialisasi Perauran Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak kepada masyarakat Desa Simandolak ?

Jawaban :

2. Apakah komunikasi antara aparat desa dan masyarakat terkait pelaksanaan aturan ini sudah berjalan secara jelas dan konsisten?

Jawaban :

IV. Struktur Birokrasi

1. Apakah terdapat prosedur atau standar operasional (SOP) yang jelas dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di Desa Simandolak?

Jawaban :

2. Bagaimana bentuk koordinasi dan pengawasan antara Kepala Desa dan satgas dalam menjalankan kebijakan tersebut?

Jawaban :

Simandolak, Maret 2026
informasi.

1 - - - - 1.

II. Dokumentasi Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Studi Kasus Desa Simandolak



Gambar I : Wawancara dengan Responden Kepala Desa



Gambar II : Wawancara dengan Responden Ketua Satgas

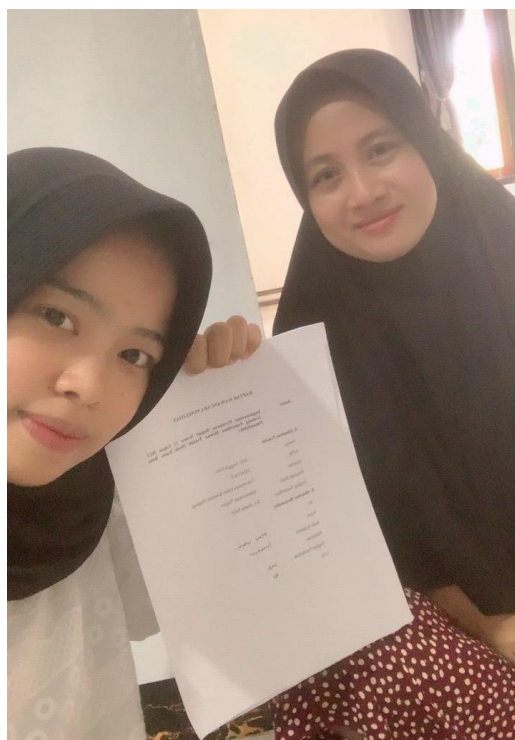


Gambar III : Wawancara dengan Responden Anggota Satgas



Gambar IV : Wawancara dengan Responden Peternak





Gambar VI : Wawancara dengan Responden Masyarakat



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 052/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002
 - a. Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Jelly Anggia Putri
NPM : 220411305
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Terhadap Penertiban Hewan Ternak di Desa Simandolak

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
 3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
 5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
KECAMATAN BENAI
KANTOR DESA SIMANDOLAK**

Jl.: Abdul Majid No. 02 Desa Simandolak e-mail:simandolakdesa@gmail.com Kode Pos 29566

Simandolak, 19 Mei 2026

Nomor : 075/SBIP/Pem-SMD/V/2026
Lamp : -
Perihal : **Surat Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibuk/Sdr/I :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan
Singingi

Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Pelaksanaan Riset Nomor 139/FIS/UNIKS/PMH/V/2026 Tanggal 18 Mei 2026 Tentang Permohonan Pelaksanaan Riset di Desa Simandolak Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi Maka Kami memberikan izin kepada

Adapun nama tersebut sebagai berikut :

Nama : **JELLY ANGGIA PUTRI**
NIM : 220411005
Jenjang : S1
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOCIAL UNVERSITAS ISLAM
KUANTAN SINGINGI

Untuk melaksanakan riset di Dsa Simandolak Kec. Benai kab. Kuantan singing yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA SIMANDOLAK)**” pada tanggal 10 April 2026 sampai dengan selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Simandolak
Pada tanggal : 18 Mei 2026

KEPALA DESA SIMANDOLAK





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : JELLY ANGGIA PUTRI

NPM : 220411005

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing : 1. EMLIA EMHARIS S.Sos., M.Si

2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12
 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
 (STUDI KASUS DI DESA SIMANDOLAK)

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	20 Des 2025	1. Kata pengantar. 2. Judul		A	J
		3. Teori. 4. Hipotesis.			
		6. Daftar pustaka.			
2	01 Des 2025	1. Meringkas. 2. Daftar isi.		A	J
		3. Halaman			
		4. Daftar Pustaka. 5. Daftar pustaka.			



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN
SINGINGI**

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.

0760-561655, e-mail. Uniskkuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : JELLY ANGGIA PUTRI

NPM : 220411005

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN HEWAN
TERNAK (STUDI KASUS DESA SIMANDOLAK)

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	Selasa 12 Mei 2016				
		Hasil wawancara 1 Spasi Tambahkan analisis terimplementasi			
		Pertailampiran Daftar wawancara Bi data			
		Dokumentasi surat pernyataan Surat balasan keartian skripsi Kata pengantar Abstrak Daftar tabel			
		Kata persembahan Jambor			
	Selasa 17 Mei 2016	Margins cover 1 Spasi observasi Narasi "dokumen"			

[illegible]



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Jelly Anggia Putri

NPM : 220411005

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban
Hewan Ternak (Studi Kasus : Desa Simandolak)

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 15 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam , S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Jelly Anggia Putri**

NPM : 220411005

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Simandolak).

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 18 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jelly Anggia Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/11 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Simandolak
Alamat Email : jellyanggiap@gmail.com
Pendidikan : 1. Tahun 2010 LULUS TK Islam Baiturrahman
2. Tahun 2016 LULUS SD Negeri 001 Simandolak
3. Tahun 2019 LULUS MTs Babussalam Simandolak
4. Tahun 2022 LULUS SMA Negeri 1 Benai

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 18 Mei 2026

Penulis



JELLY ANGGIA PUTRI